

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup; Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai salahsatu arahan pembangunan nasional memiliki tantangan pada perwujudan pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dimana salah satunya dilaksanakan melalui strategi meningkatkan Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial dengan sasaran peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional yang salah satunya adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024 juga telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan yang keseluruhannya akan dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*).

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan

berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Diantara point penting dalam pelaksanaan SDG's adalah pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Dalam rangka mempedomani dan mengacu apa yang menjadi agenda pembangunan nasional dengan fokus pada agenda pembangunan nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Provinsi Sumatera Utara telah menjadikan agenda peningkatan kualitas SDM dengan sasaran pada perempuan, anak dan pemuda sebagai salah satu agenda pembangunan yang telah tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Kerja (Renja) Dinas terkait dan Renstra/Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

## **1.2. Landasan Hukum**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Intruksi Presiden Nomor Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
18. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara;
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 yang dibiayai dengan APBD Provinsi maupun APBN;
3. Memuat pengukuran kinerja DPPPA sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

#### **2.3.1 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja DPPPA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap RKPD / Renstra OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Program dan Kegiatan

## **BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2020 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Adapun hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

| No  | SASARAN STRATEGIS                                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                  | TARGET 2020 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| (1) | (2)                                                                                                       | (3)                                                | (4)         |
| 1   | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | 60 %        |
| 2   | Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan          | Persentase layanan terhadap perempuan dan anak     | 72 %        |
|     |                                                                                                           | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan                 | 13/100.000  |
|     |                                                                                                           | Rasio Kekerasan Terhadap Anak                      | 18/100.000  |
| 3   | Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak                                                | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)      | 35 %        |

Perjanjian Kinerja tersebut di atas adalah wujud penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Perjanjian Kinerja tahun 2020 ini merupakan penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Selain itu hal ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai upaya memenuhi visi organisasi.

## A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi OPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPPPA ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) DPPPA Provinsi Sumatera Utara, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Dari 5 (lima) misi pembangunan Sumatera Utara yang sudah dituangkan sebagai agenda pembangunan selama 5 tahun yaitu :

1. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan**, karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik**, dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesis sosial yang kuat serta harmonis;

3. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan**, karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
4. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan**, karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan**, karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat pada penjelasan misi ke 1 yaitu; **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan**, sehingga pada tahun 2022 disusunlah Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan beberapa penyesuaian target sbb :

| No | PERMASALAHAN                                                                                 | ISU STRATEGIS                         | TUJUAN                                                                                                            | SASARAN                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                        | TARGET |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|    |                                                                                              |                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Belum optimalnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan           | Kesetaraan dan keadilan gender        | Meningkatkan pelaksanaan PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan                          | Meningkatnya implementasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah                            | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG             | 49%    | 59%  | 66%  | 85%  | 100% |
| 2  | Masih rendahnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO | Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta optimalisasi kualitas layanan | Meningkatnya perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta optimalisasi kualitas layanan | Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000)               | 15     | 13   | 6    | 5    | 4    |
|    |                                                                                              |                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                   | Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000)                     | 20     | 18   | 3    | 2    | 1    |
| 3  | Belum optimalnya perlindungan terhadap Pemenuhan Hak Anak                                    | Pemenuhan hak anak                    | Meningkatkan pemenuhan hak anak                                                                                   | Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak                                                               | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi dalam Perwujudan KLA | 19%    | 44%  | 58%  | 76%  | 100% |

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun yang telah disesuaikan dengan adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19 di Sumatera Utara, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis; Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah,** dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| No | Indikator                                          | Satuan | Tahun 2020 |           |             | Target Akhir RPJMD 2023 (%) | Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD (%) |
|----|----------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
|    |                                                    |        | Target     | Realisasi | Capaian (%) |                             |                                  |
| -1 | -2                                                 | -3     | -5         | -6        | -7          | -8                          | -9                               |
| 1  | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | %      | 60         | 59        | 98          | 100                         | 98                               |

**Capaian kinerja Sasaran Strategis :** Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG. Pada tahun 2020 indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG diberikan target sebesar 30 unit atau sebesar 60 persen dari total jumlah OPD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 49 unit perangkat daerah yang sudah melaksanakan PPRG dengan variabel pendukung berupa adanya dokumen pendukung seperti **Renstra, Renja, RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah responsive Gender**. Target ini tidak mengalami perubahan meskipun adanya *refocusing* anggaran, karena adanya komitmen yang kuat dari setiap OPD untuk mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 98 persen atau sebanyak 29 OPD yang telah memiliki dokumen pendukung yang responsif gender. Adapun ke 29 OPD yang telah memiliki dokumen responsif gender tersebut adalah :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. BKD Provsu
3. Dinas Sosial Provsu
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu
7. Inspektorat Provsu
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10. Satuan Polisi Pamong Praja Provsu
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu
12. Dinas Tenaga Kerja Provsu
13. Biro Hukum Setdaprovsu
14. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provsu
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu
17. Dinas Lingkungan Hidup Provsu
18. Dinas Koperasi dan UMKM Provsu
19. Dinas Kehutanan Provsu
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu
21. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provsu
22. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu
23. Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu
24. Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. Muhammad Ildrem Provsu
25. Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu
26. Dinas Perhubungan Provsu
27. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu
28. RS. Haji Medan Provsu
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu

Capaian sebanyak 29 OPD (98 %) yang mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender, mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender di Sumatera Utara sudah cukup baik, yang didukung oleh beberapa kegiatan penguatan diantaranya :

| No                         | Kegiatan Pendukung                                                            | Satuan | Tahun 2020 |         |           |             | Target Akhir RPJMD 2023 | Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD (%) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------|----------------------------------|
|                            |                                                                               |        | Target     |         | Realisasi | Capaian (%) |                         |                                  |
|                            |                                                                               |        | Sebelum    | Sesudah |           |             |                         |                                  |
| 1                          | Pelatihan Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial                | org    | 150        | 75      | 50        | 67%         | 750                     | 7%                               |
| 2                          | Penguatan Industri Rumahan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi            | org    | 150        | 100     | 50        | 50%         | 875                     | 6%                               |
| 3                          | Advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | org    | 300        | 150     | 100       | 67%         | 5000                    | 2%                               |
| Persentase Capaian Kinerja |                                                                               |        |            |         |           | 61%         |                         | 5%                               |

Secara umum, capaian beberapa kegiatan penguatan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan pada tahun 2020 belum optimal dan mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

- a. Belum adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang dapat menjadi pedoman dalam implementasi gender dalam pembangunan daerah yang kompleks;
- b. Terjadinya *refocusing* anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang terjadi di Sumatera Utara;
- c. Masih minimnya kapasitas aparatur yang memahami secara keseluruhan terkait dengan isu gender dan kepentingannya dalam pembangunan daerah;
- d. Belum optimalnya upaya pendekatan dan advokasi integrasi gender ke dalam dokumen pembangunan pada level pengambil kebijakan dan keputusan;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan implementasi gender dalam pembangunan daerah.

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Meningkatkan Kesetaraan gender dalam pembangunan adalah :

- a. Melakukan advokasi secara intens dalam rangka upaya penyusunan Ranperda Gender Dalam Pembangunan Daerah terhadap pengambil kebijakan baik dari Eksekutif maupun Legislatif;

- b. Mengoptimalkan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan non anggaran (melalui aplikasi online)
- c. Mengoptimalkan pembinaan (*transfer knowledge*) bagi aparatur perencana;
- d. Mengoptimalkan upaya advokasi pada jenjang struktural pengambil kebijakan;
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kabupaten/kota.

**2. Sasaran Strategis, Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan**, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| No | Indikator                                                       | Satuan       | Tahun 2020 |         |           |             | Target Akhir RPJMD 2023 (%) | Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
|    |                                                                 |              | Target     |         | Realisasi | Capaian (%) |                             |                                  |
|    |                                                                 |              | Sebelum    | Sesudah |           |             |                             |                                  |
| 1  | Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | %            | 100        | 100     | 94        | 94%         | 100                         | 99%                              |
| 2  | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan                              | /<br>100.000 | 13         | 6       | 5         | 83%         | 5                           | 100%                             |
| 3  | Rasio Kekerasan Terhadap Anak                                   | /<br>100.000 | 18         | 15      | 12        | 80%         | 12                          | 100%                             |

**Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan** dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mana pada tahun 2020 layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan memiliki target sebanyak 1.050 layanan (tatap muka) dengan asumsi pelayanan diberikan sebesar secara keseluruhan (100%). Setelah adanya pandemi Covid 19 yang juga melanda Sumatera Utara dan berdampak pada *refocusing* anggaran, maka kemudian dilakukan penyesuaian bentuk layanan diberikan yang pada awalnya dilakukan secara langsung (tatap muka) menjadi layanan secara tidak langsung (online). Penyesuaian ini juga dilakukan terhadap target capaian yang sebelumnya sebanyak 1.050 layanan menjadi 660 layanan dengan asumsi pelayanan yang diberikan juga secara keseluruhan (100%). Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan

masyarakat tetap mendapat layanan yang baik selama masa pandemi Covid 19.

Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2TP2A sebagai unit pengampu dan pemberi layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan baik secara langsung maupun secara tidak langsung (online) selama pandemi Covid 19 di Sumatera Utara, memperlihatkan bahwa jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat korban kekerasan sebanyak 619 layanan atau sebesar 94 % dari total layanan yang ditargetkan sebanyak 660 layanan dengan asumsi layanan yang diberikan secara keseluruhan (100 %)

Indikator lain yang menjadi pendukung capaian sasaran strategis Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

Pada tahun 2020 (masa pandemi Covid 19) indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan mengalami perubahan target capaian, yang awalnya (sebelum pandemi Covid 19) dari setiap 100.000 penduduk perempuan dewasa sebanyak 13 perempuan yang melaporkan menjadi korban kekerasan menjadi 6 perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 407 perempuan yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 7.481.083. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan adalah sebanyak 5 perempuan.

Sedangkan untuk korban kekerasan pada anak di Sumatera Utara, pada tahun 2020 juga mengalami perubahan, yang sebelumnya dari 100.000 jumlah penduduk usia anak, sebanyak 18 anak mengalami kekerasan yang dilaporkan, berubah menjadi 15 anak mengalami kekerasan. Perubahan target ini juga dikarenakan adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang melanda Sumatera Utara. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 591 anak yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk usia anak di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 4.970.764. Sehingga realisasi rasion kekerasan terhadap anak dari setiap 100.000 penduduk usia anak sebanyak 12 anak.

Adapun pelaporan yang dilakukan terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak dilakukan melalui pengaduan berbasis aplikasi yang

dapat dilakukan oleh seluruh element masyarakat yang terlibat dalam proses pengaduan pada halaman <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>.

Capaian dari rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak setelah pandemi Covid 19 sebagaimana tabel di atas, memperlihatkan bahwa penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara masih sangat lambat, dan perlu terus ditingkatkan serta diperkuat dengan optimalisasi koordinasi dan regulasi yang akan mendukung percepatan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara.

Upaya penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara pada tahun 2020 setelah terjadinya *refocusing* anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19, didukung oleh beberapa kegiatan sbb :

| No                         | Kegiatan Pendukung                                                                           | Satuan  | Tahun 2020 |         |           |             | Target Akhir RPJMD 2023 | Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD (%) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------|----------------------------------|
|                            |                                                                                              |         | Target     |         | Realisasi | Capaian (%) |                         |                                  |
|                            |                                                                                              |         | Sebelum    | Sesudah |           |             |                         |                                  |
| 1                          | Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI)                      | org     | 250        | 100     | 100       | 100%        | 1250                    | 8%                               |
| 2                          | Pelatihan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)                  | org     | 640        | 350     | 320       | 91%         | 1750                    | 18%                              |
| 3                          | Advokasi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak                                               | org     | 200        | 100     | 100       | 100%        | 400                     | 25%                              |
| 4                          | Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara                                                         | layanan | 1050       | 835     | 619       | 74%         | 4800                    | 20%                              |
| 5                          | Penyusunan Kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak | dok     | 1          | 0       | 0         | 0%          | 10                      | 0%                               |
| Persentase Capaian Kinerja |                                                                                              |         |            |         |           | 73%         |                         | 14%                              |

Secara umum, capaian beberapa kegiatan pendukung sasaran strategis Menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dikatakan baik, namun masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

- a. Belum selesainya perubahan regulasi (Peraturan Daerah) yang dapat menjadi pedoman dalam menurunkan kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang;

- b. Terjadinya *refocusing* anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang dikhawatirkan akan mempengaruhi target capaian kinerja;
- c. Masih minimnya kapasitas aparatur yang memahami secara keseluruhan terkait dengan upaya penurunan kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang;
- d. Belum optimalnya upaya penurunan kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang melalui program / kegiatan terintegrasi dan melibatkan seluruh pihak;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan upaya penurunan kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang di Sumatera Utara.

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang adalah :

- a. Melakukan advokasi secara intens dalam rangka upaya perubahan Peraturan Daerah terkait dengan upaya penurunan kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang di Sumatera Utara terhadap pengambil kebijakan baik dari Eksekutif maupun Legislatif;
- b. Mengoptimalkan capaian kinerja yang telah mengalami perubahan target melalui pelaksanaan alternatif bentuk kegiatan pencegahan dan advokasi kekerasan bagi perempuan dan anak yang lainnya, seperti pertemuan secara online dll;
- c. Mengoptimalkan pembinaan (*transfer knowledge*) bagi aparatur perencana terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara;
- d. Mengoptimalkan upaya advokasi pada jenjang struktural pengambil kebijakan;
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kabupaten/kota.

**3. Sasaran strategis, Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak** dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah :

| No                         | Indikator                                                                               | Satuan | Tahun 2019 |         |           | Capaian (%) | Target Akhir RPJMD 2023 (%) | Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD (%) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                            |                                                                                         |        | Target     |         | Realisasi |             |                             |                                  |
|                            |                                                                                         |        | Sebelum    | Sesudah |           |             |                             |                                  |
| 1                          | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) | %      | 35         | 25      | 20        | 80%         | 100%                        | 80%                              |
| Persentase Capaian Kinerja |                                                                                         |        |            |         |           | 80%         |                             | 80%                              |

**Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak** dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) yang mana pada tahun 2020 pada awalnya memiliki target sebesar 35% atau sebanyak 17 perangkat daerah akan berkontribusi dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara. Namun karena adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19 di Sumatera Utara, maka target untuk indikator ini mengalami penyesuaian menjadi 25% atau sebanyak 12 perangkat daerah berkontribusi, dengan realisasi target kinerja sebanyak 20% atau 10 perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara, sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Pemuda dan Olahraga
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
7. Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Dinas Perpustakaan dan Arsip
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian hasil dari yang ditargetkan ini, memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui beberapa perangkat daerah terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai koordinasi KLA di Sumatera Utara tetap berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Layak Anak dengan beberapa kegiatan pendukung, diantaranya :

| No                         | Kegiatan Pendukung                                                   | Satuan   | Tahun 2019 |         |           |             | Target Akhir RPJMD 2023 | Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD (%) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------|----------------------------------|
|                            |                                                                      |          | Target     |         | Realisasi | Capaian (%) |                         |                                  |
|                            |                                                                      |          | Sebelum    | Sesudah |           |             |                         |                                  |
| 1                          | Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah                            | kab/kota | 33         | 17      | 17        | 100%        | 33                      | 52%                              |
| 3                          | Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak                       | orang    | 62         | 31      | 22        | 71%         | 750                     | 3%                               |
| 5                          | Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya | orang    | 800        | 600     | 500       | 83%         | 4000                    | 13%                              |
| 6                          | Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak                      | orang    | 33         | 33      | 28        | 85%         | 400                     | 7%                               |
| Persentase Capaian Kinerja |                                                                      |          |            |         |           | 85%         |                         | 18%                              |

Namun demikian masih banyaknya kendala dan kekurangan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak anak di seluruh wilayah Sumatera Utara ini diantaranya adalah :

- a. Belum adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang dapat menjadi pedoman dalam percepatan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara;
- b. Belum adanya Rencana Aksi yang terintegrasi dan melibatkan seluruh sektor serta potensi pembangunan dalam mewujudkan KLA di Sumatera Utara;
- c. Terjadinya *refocusing* anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang dikhawatirkan akan mempengaruhi target capaian kinerja
- d. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi terkait dengan upaya percepatan upaya implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara.

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang adalah :

- a. Melakukan advokasi secara intens dalam rangka upaya percepatan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utamelalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak terhadap pengambil kebijakan baik dari Eksekutif maupun Legislatif;

- b. Mepercepat penyusunan Rencana Aksi perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara yang melibatkan seluruh potensi dan stakelholders;
- c. Memperkuat kerjasama dan perluasan jejang yang melibatkan Lembaga Masyarakat dan seluruh komponen masyarakat lainnya;
- d. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kabupaten/kota.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Hingga Tahun 2021

| NO | PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR                                    | Target Kinerja Capaian Program Renstra PD pada Tahun 2023 |                | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 |     | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 |                |                                             |                |                   |     | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |                | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021 |             |                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
|    |                                                                    |                                              |                                                           |                |                                                                             |     | Target Renja OPD Tahun 2021                                  |                | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 |                | Tingkat Realisasi |     |                                                                 |                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022     |             | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1  | 2                                                                  | 3                                            | 4                                                         |                | 5                                                                           |     | 6                                                            |                | 7                                           |                | 8 = (7/6)         |     | 9                                                               |                | 10=(5+7+9)                                                |             | 11=(10/4)                                |
|    |                                                                    |                                              | K                                                         | Rp.            | K                                                                           | Rp. | K                                                            | Rp.            | K                                           | Rp.            | K                 | Rp. | K                                                               | Rp.            | K                                                         | Rp.         |                                          |
| I  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              |                                              |                                                           |                | 0                                                                           | 0   | 100 %                                                        | 11.498.170.600 | 58 %                                        | 10.228.356.665 | 58%               | 89% | 100                                                             | 11.225.252.356 |                                                           | 952.520.582 | 18%                                      |
|    | 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                              |                                                           |                | -                                                                           | -   |                                                              | 55.720.000     |                                             | 15.767.500     |                   | 28% |                                                                 | 26.921.000     |                                                           | 0           |                                          |
|    | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen yang disusun                  | 30 dok                                                    | 33.651.250     | 0                                                                           | 0   | 10 dok                                                       | 55.720.000     | 3 dok                                       | 15.767.500     | 30%               | 28% | 10 dok                                                          | 26.921.000     | 0 dok                                                     | -           | -                                        |
|    | 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                              |                                                           |                | -                                                                           | -   |                                                              | 9.129.574.303  |                                             | 8.524.221.835  |                   | 93% |                                                                 | 8.337.718.544  |                                                           | 627.476.311 |                                          |
|    | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Gaji dan tunjangan tersedia                  | 12 bulan                                                  | 10.132.648.180 | 0                                                                           | 0   | 14 bulan                                                     | 8.668.874.303  | 13 bulan                                    | 8.077.951.835  | 93%               | 93% | 14 kali                                                         | 8.106.118.544  | 3 bulan                                                   | 598.296.311 | 25%                                      |
|    | 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah jasa yang disediakan                  | 12 bulan                                                  | 289.500.000    | 0                                                                           | 0   | 12 bulan                                                     | 460.700.000    | 12 bulan                                    | 446.270.000    | 100 %             | 97% | 12 bulan                                                        | 231.600.000    | 2 bulan                                                   | 29.180.000  | 17%                                      |
|    | 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                              |                                                           |                | -                                                                           | -   |                                                              | 3.850.000      |                                             | 1.650.000      |                   | 43% |                                                                 | 17.000.000     |                                                           | -           |                                          |
|    | 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan                     | Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti | 9 org                                                     | 21.250.000     | 0                                                                           | 0   | 2 kali                                                       | 3.850.000      | 1 kali                                      | 1.650.000      | 50%               | 43% | 3 orang                                                         | 17.000.000     | 0 orang                                                   | -           | -                                        |

|  |   |                                                                  |                                                                              |                                                                        |           |             |   |   |               |             |             |             |       |       |             |             |             |             |     |
|--|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|  |   |                                                                  | Tugas dan Fungsi                                                             |                                                                        |           |             |   |   |               |             |             |             |       |       |             |             |             |             |     |
|  | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                              |                                                                        |           |             |   |   | 1.125.644.585 |             | 644.060.258 |             | 57%   |       | 551.279.670 |             | 127.698.300 |             |     |
|  |   | 1                                                                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan  | 14.067.000  | 0 | 0 | 12 bulan      | 17.537.300  | 12 bulan    | 17.830.800  | 100 % | 102 % | 12 bulan    | 11.253.600  | 0 bulan     | -           | -   |
|  |   | 2                                                                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan               | 21 unit   | 5.875.000   | 0 | 0 | 7 unit        | 24.500.000  | 7 unit      | 24.500.000  | 100 % | 100 % | 15 unit     | 4.700.000   | 0 unit      | -           | -   |
|  |   | 3                                                                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                           | 12 bulan  | 110.723.150 | 0 | 0 | 12 bulan      | 140.994.635 | 12 bulan    | 144.126.220 | 100 % | 102 % | 12 bulan    | 88.578.520  | 2 bulan     | 2.625.000   | 17% |
|  |   | 4                                                                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                  | 12 bulan  | 39.039.438  | 0 | 0 | 12 bulan      | 67.999.650  | 10 bulan    | 53.456.800  | 83%   | 79%   | 12 bulan    | 31.231.550  | 2 bulan     | 600.000     | 17% |
|  |   | 5                                                                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah bahan bacaan yang disediakan                                    | 20000 eks | 7.590.000   | 0 | 0 | 1320 eks      | 4.488.000   | 1150 eks    | 3.910.000   | 87%   | 87%   | 12 bulan    | 6.072.000   | 2 bulan     | 790.000     | 17% |
|  |   | 6                                                                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                                    | 12 bulan  | 511.805.000 | 0 | 0 | 12 bulan      | 870.125.000 | 7 bulan     | 400.236.438 | 58%   | 46%   | 12 bulan    | 409.444.000 | 4 bulan     | 123.683.300 | 33% |
|  | 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                              |                                                                        |           |             |   |   | 117.550.000   |             | 118.342.500 |             | 101 % |       |             |             |             |             |     |
|  |   | 1                                                                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Perlengkapan gedung/kantor yang disediakan                             | 25 unit   | -           | 0 | 0 | 31 unit       | 117.550.000 | 31 unit     | 118.342.500 | 100 % | 101 % |             |             |             |             |     |

|    |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                          |          |             |   |   |             |             |             |                |       |       |               |             |             |             |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------|-------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 6  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                                 |                                                                          |          | -           | - |   | 802.588.662 |             | 707.343.564 |                | 88%   |       | 1.044.566.396 |             | 181.703.459 |             |     |
|    | 1                                                                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan             | 12 bulan | 725.594.995 | 0 | 0 | 12 bulan    | 552.988.662 | 12 bulan    | 510.843.564    | 100 % | 92%   | 12 bulan      | 580.475.996 | 2 bulan     | 113.032.259 | 17% |
|    | 2                                                                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan                               | 12 bulan | 580.113.000 | 0 | 0 | 12 bulan    | 249.600.000 | 10 bulan    | 196.500.000    | 83%   | 79%   | 13 kali       | 464.090.400 | 2 bulan     | 68.671.200  | 17% |
| 7  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                 |                                                                          |          |             | - | - | 263.243.050 |             | 216.971.008 |                | 82%   |       | 1.247.766.746 |             | 15.642.512  |             |     |
|    | 1                                                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang disediakan                        | 42 unit  | 790.325.444 | 0 | 0 | 12 bulan    | 181.102.850 | 10 bulan    | 163.401.008    | 83%   | 90%   | 10 unit       | 632.260.355 | 3 unit      | 15.642.512  | 7%  |
|    | 2                                                                     | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jasa pemeliharaan sarpras gedung yang mendapatkan pemeliharaan           | 11 unit  | 749.976.739 | 0 | 0 | 12 bulan    | 22.215.200  | 12 bulan    | 22.245.000     | 100 % | 100 % | 2 unit        | 599.981.391 | 0 unit      | -           | -   |
|    | 3                                                                     | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jasa pemeliharaan sarpras pendukung gedung yang mendapatkan pemeliharaan | 30 unit  | 19.406.250  | 0 | 0 | 12 bulan    | 59.925.000  | 5 bulan     | 31.325.000     | 42%   | 52%   | 10 unit       | 15.525.000  | 0 unit      | -           | -   |
| II | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN                                    |                                                                                                                 |                                                                          |          |             | 0 | 0 | 100 %       | 299.769.000 | 33 %        | 154.223.500,00 | 33%   | 51%   | 251.941.000   |             | 3.000.000   |             |     |

| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                   |           |             |     |  |           |            |             |            |            |       |           |            |           |           |     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|--|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|
| 1                      | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                                  |                                                                                                                                     |                                                                                   |           |             |     |  |           |            | 103.599.000 |            | 60.700.000 | 59%   |           | 93.310.000 | -         |           |     |
|                        | 1                                                                                                                    | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi                                                 | Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peran perempuan dalam politik | 3 dok     | 39.981.250  | 0   |  | 1 dok     | 42.965.000 | - dok       | -          | 0%         | 0%    | 1 dok     | 31.985.000 | -         | -         |     |
|                        | 2                                                                                                                    | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi                                               | Jumlah focal point PD yang mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG                  | 350 orang | 76.656.250  | 0 % |  | 135 orang | 60.634.000 | 135 orang   | 60.700.000 | 100 %      | 100 % | 75 orang  | 61.325.000 | -         | -         |     |
| 2                      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                     |                                                                                   |           |             |     |  |           |            | 93.810.000  |            | 66.323.500 | 71%   |           | 99.075.000 | 3.000.000 |           |     |
|                        | 1                                                                                                                    | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah pelaku IR yang mendapatkan pelatihan Market Place                          | 250 orang | 123.843.750 | 0   |  | 100 IR    | 93.810.000 | 71 IR       | 66.323.500 | 71%        | 71%   | 105 orang | 99.075.000 | 50 orang  | 3.000.000 | 20% |
| 3                      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   |           |             |     |  |           |            | 102.360.000 |            | 27.200.000 | 27%   |           | 59.556.000 | -         |           |     |

|     |                                |                                                                                                                                     |                                                                                  |           |             |   |           |               |           |             |       |       |           |             |  |            |   |  |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|-------------|--|------------|---|--|
|     |                                | Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                       |                                                                                  |           |             |   |           |               |           |             |       |       |           |             |  |            |   |  |
|     | 1                              | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                | Jumlah pelaku IR yang mengikuti penguatan keuangan                               | 300 orang | 74.445.000  | 0 | 250 IR    | 102.360.000   | 66 IR     | 27.200.000  | 26%   | 27%   | 100 orang | 59.556.000  |  | -          | - |  |
| III | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN |                                                                                                                                     |                                                                                  |           |             | - | 100 %     | 1.556.674.200 | 29 %      | 694.386.929 | 29%   | 45%   |           | 879.439.294 |  | 88.228.100 |   |  |
|     | 1                              | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota         |                                                                                  |           |             |   |           | 152.389.500   |           | 103.307.000 |       | 68%   |           |             |  |            |   |  |
|     | 1                              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari TindakKekerasan                                    | Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari TindakKekerasan | 300 orang | 187.500.000 |   | 165 orang | 98.469.500    | 82 orang  | 49.307.000  | 50%   | 50%   | 100 orang | 150.000.000 |  | -          | - |  |
|     | 2                              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi                        | 300 orang | -           |   | 100 orang | 53.920.000    | 100 orang | 54.000.000  | 100 % | 100 % |           |             |  | -          | - |  |

|  |   |                                                                                                                                                         |                                                                                       |              |             |  |               |               |             |             |     |     |              |             |            |            |            |
|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|------------|------------|
|  | 2 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                       |              |             |  |               | 1.040.432.800 |             | 288.442.929 |     | 28% |              |             |            | 6.793.100  |            |
|  | 1 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota                        | Layanan yang diberikan                                                                | 3600 layanan | 527.639.286 |  | 1.150 layanan | 613.452.800   | 280 layanan | 253.805.279 |     | 41% | 1200 layanan | 422.111.429 | 50 layanan | 6.793.100  | 1%         |
|  | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                         |                                                                                       |              |             |  | layanan       | 426.980.000   | 39 layanan  | 34.637.650  |     | 8%  |              |             |            |            | -          |
|  | 3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                          |                                                                                       |              |             |  |               | 363.851.900   |             | 302.637.000 |     | 83% |              |             |            |            | 81.435.000 |
|  | 1 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                                               | Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan | 3000 paket   | 333.748.125 |  | 300 orang     | 226.692.400   | 255 orang   | 192.950.000 | 85% | 85% | 1000 paket   | 266.998.500 | 250 paket  | 80.310.000 | 8%         |

|    |                                                 |                                                                                                                               |                                                                                         |            |             |   |   |             |             |           |             |     |     |            |             |          |           |     |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|------------|-------------|----------|-----------|-----|
|    | 2                                               | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | Jumlah pemenuhan kebutuhan spesifik dalam kondisi khusus dan kondisi darurat            | 350 orang  | 237.911.706 |   |   | 300 orang   | 137.159.500 | 239 orang | 109.687.000 | 80% | 80% | 150 orang  | 190.329.365 | 50 orang | 1.125.000 | 14% |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA           |                                                                                                                               |                                                                                         |            |             | 0 | 0 | 100 %       | 137.168.000 | 5 %       | 6.000.000   | 5%  | 4%  |            |             |          |           |     |
|    | 1                                               | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                        |                                                                                         |            |             |   |   |             | 137.168.000 |           | 6.000.000   |     | 4%  |            |             |          |           |     |
|    | 1                                               | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi                         | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan KIE KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga       | 250 orang  | -           |   |   | 100 orang   | 51.801.000  | 12 orang  | 6.000.000   | 12% | 12% |            |             |          |           |     |
|    | 2                                               | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan penguatan mengenai layanan kualitas keluarga | 60 lembaga | 55.236.875  |   |   | 200 lembaga | 85.367.000  | - lembaga | -           | 0%  | 0%  | 20 lembaga | 44.189.500  | -        | -         | -   |
| V  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK |                                                                                                                               |                                                                                         |            |             | 0 | 0 | 100 %       | 546.270.500 | 38 %      | 260.600.000 | 38% | 48% |            |             | 1%       | 2.350.000 |     |

|    |                                                                                                                                             |                                                        |             |             |  |   |              |             |             |             |                |     |            |             |            |            |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|---|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----|------------|-------------|------------|------------|-----|
| 1  | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                       |                                                        |             |             |  |   |              | 546.270.500 |             |             | 260.600.000,00 | 48% |            |             |            | 2.350.000  |     |
|    | 1 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                  | Jumlah variabel data gender dan anak yang disediakan   | 18 variabel | 182.260.813 |  |   | 70 %         | 90.358.750  | 39 %        | 51.100.000  | 56%            | 57% | 6 variabel | 145.808.650 | 2 variabel | 2.350.000  | 33% |
|    | 2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                            | Jumlah variabel data gender dan anak yang dimanfaatkan | 18 variabel | 22.050.000  |  |   | 100 variabel | 455.911.750 | 47 variabel | 209.500.000 | 47%            | 46% | 6 variabel | 17.640.000  | -          | -          | -   |
| VI | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                            |                                                        |             |             |  | 0 | 0            | 100 %       | 769.743.000 | 33 %        | 376.418.000    | 33% | 49%        |             | 5%         | 23.600.000 |     |
|    | 1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                              |                                                        |             |             |  |   |              | 27.500.000  |             | -           |                | 0%  |            |             |            | 0          |     |
|    | 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun       | 3 dok       | 41.512.500  |  |   | 1 dok        | 27.500.000  | - dok       | -           | 0%             | 0%  | 1 dok      | 33.210.000  | -          | -          | -   |
|    | 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                   |                                                        |             |             |  |   |              | 742.243.000 |             | 376.418.000 |                | 51% |            |             |            | 23.600.000 |     |

|    |   |                                                                                                                                                     |                                                                                    |             |             |   |   |           |             |           |                |       |     |             |             |          |            |     |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|-----------|-------------|-----------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|----------|------------|-----|
|    | 1 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                              | Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak       | 300 orang   | 523.899.250 |   |   | 250 orang | 264.360.000 | 243 orang | 256.043.000    | 97%   | 97% | 100 orang   | 419.119.400 | 50 orang | 23.600.000 | 17% |
|    | 2 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Forum Anak yang mendapatkan edukasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak         | 33 fad      | -           |   |   | 33 Fad    | 351.498.000 | 2 Fad     | 23.100.000     | 6%    | 7%  |             |             | -        | -          | -   |
|    | 3 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota              | Jumlah kab/kota yang mendapatkan penguatan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | 33 kab/kota | 71.125.000  |   |   | 33 kab    | 126.385.000 | 43 kab    | 97.275.000     | 130 % | 77% | 33 kab/kota | 56.900.000  | -        | -          | -   |
| VI | I | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                    |                                                                                    |             | 0           | 0 | 0 | 100 %     | 480.410.700 | 32 %      | 385.152.800,00 | 32%   | 80% |             |             |          |            |     |
|    | 1 | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota                              |                                                                                    |             |             |   |   |           | 135.919.200 |           | 72.251.500     |       | 53% |             |             |          |            |     |

|  |   |                                                                                                                                        |                                                                                       |           |             |  |  |           |             |           |             |     |     |           |             |   |   |   |
|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|-----------|-------------|---|---|---|
|  | 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan     | 300 orang | 169.899.000 |  |  | 226 orang | 135.919.200 | 120 orang | 72.251.500  | 53% | 53% | 100 orang | 135.919.200 | - | - | - |
|  | 2 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                    |                                                                                       |           |             |  |  |           | 267.059.500 |           | 248.294.900 |     | 93% |           |             |   |   |   |
|  | 1 | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                               | Jumlah SDM yang mendapatkan pengembangan KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus | 450 orang | 70.843.750  |  |  | 200 orang | 56.675.000  | 189 orang | 53.180.000  | 95% | 94% | 250 orang | 56.675.000  | - | - | - |
|  | 2 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                         | Aktifis PATBM di kabupaten/kota yang mendapat pelatihan                               | 300 orang | 262.980.625 |  |  | 355 orang | 210.384.500 | 334 orang | 195.114.900 | 94% | 93% | 100 orang | 210.384.500 | - | - | - |
|  | 3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah                       |                                                                                       |           |             |  |  |           | 77.432.000  |           | 64.606.400  |     | 83% |           |             |   |   |   |

| Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota |                                                                                                                                                     |                                                                                 |           |   |  |  |          |            |          |            |     |     |  |  |   |   |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|--|----------|------------|----------|------------|-----|-----|--|--|---|---|---|
| 1                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta penyedia layanan yang mendapatkan advokasi peningkatan kapasitas | 300 orang | - |  |  | 20 orang | 77.432.000 | 17 orang | 64.606.400 | 85% | 83% |  |  | - | - | - |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara maka dituangkanlah kinerja tersebut ke dalam beberapa Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG
2. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
3. Rasio Kekerasan Terhadap Anak
4. Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten / Kota Layak Anak (Menuju)

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 memperlihatkan adanya perlambatan kenaikan target kinerja walaupun tidak keseluruhan target yang disebabkan adanya penyesuaian kebijakan dan anggaran sebagai respon atas kondisi yang terjadi di Sumatera Utara terkhusus pada upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 baik itu oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dari Pemerintah melalui Kementerian terkait, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4  
Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Sumatera Utara

| No | Indikator Kinerja Utama                            | Satuan   | Realisasi 2021 | Target 2022 | Keterangan                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | Persen   | 64%            | 85%         | Sumber perhitungan adalah dokumen perencanaan OPD Provinsi                                              |
| 2  | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan                 | /100.000 | 6              | 5           | Data perhitungan bersumber dari laporan kekerasan pada aplikasi Simfoni yang disesuaikan dengan kondisi |

|   |                                                                                         |         |     |     |                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Rasio Kekerasan Terhadap Anak                                                           | /10.000 | 2   | 2   | Data perhitungan bersumber dari laporan kekerasan pada aplikasi Simfoni yang disesuaikan dengan kondisi      |
| 4 | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) | Persen  | 52% | 76% | Penyesuaian target 2022 disesuaikan dengan perubahan kebijakan pencapaian indikator oleh Kementerian PPPA RI |

### 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup baik, namun berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang diharmonisasikan dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian PPPA RI, maka terdapat beberapa isu penting pembangunan PPPA yang telah diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2022 yaitu :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak;
5. Pencegahan perkawinan anak.

## 2.4 Review terhadap awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun berpedoman kepada RPJMD tahun rencana, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan sistematika penyusunan RKPD Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. Top-down, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas dan kebijakan Pusat di daerah.
- b. Bottom-up, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan disampaikan pada Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara.
- c. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi, berupa saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- d. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
- e. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

- f. Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan melalui usulan proposal. Proposal akan diseleksi melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pendekatan diatas, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan Awal RKPD
- b. Penyusunan RKPD
- c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
- d. Perumusan Akhir RKPD
- e. Penetapan RKPD

Kedudukan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan RKPD tahun ke-3 selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan RPJMD sesuai Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran per kegiatan. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan tentu saja akan memperhatikan dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD). Sebelum ditetapkan RAPBD, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas I-3 RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 lebih tajam sebelum sampai kepada rincian APBD. KUA memberikan suatu gambaran umum tentang kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran ke depan. Berdasarkan KUA, PPAS menetapkan prioritas plafon anggaran untuk setiap perangkat daerah berdasarkan fungsinya, plafon anggaran akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan anggaran per program per kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunannya. Atas dasar itu, perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran. Akumulasi dari semua rencana kerja dan anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah akan melahirkan RAPBD.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Perangkat Daerah; dan d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dokumen RKPD Sumatera Utara Tahun 2022 telah meletakkan beberapa kebijakan yang telah dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Pembangunan PPPA Tahun 2022 yaitu :

Tabel. 5  
Target Kinerja Tahun 2022

| No | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                 | TARGET KINERJA |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|    |                                                                                         | 2021           | 2022 |
| 1  | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG                                      | 66%            | 85%  |
| 2  | Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000)                                        | 6              | 5    |
|    | Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000)                                              | 3              | 2    |
| 3  | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) | 58%            | 76%  |

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- a. Lemahnya kelembagaan PUG (Pokja/Focal Point) serta rendahnya pemahaman perencana dalam menyusun PPRG membuat komitmen

- pengambil kebijakan dalam pembangunan yang Responsive Gender belum maksimal;
- b. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum tersedianya pusat informasi layanan terhadap anak
  - c. Belum Optimalnya pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan dan belum optimalnya penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan bencana
  - d. Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan.

Di dalam ranwal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 juga diharapkan dapat memuat isu gender yang telah menjadi isu Nasional dan Trans Nasional, dengan Arah kebijakan Pengarusutamaan Gender sebagai berikut:

1. Mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa melalui :
  - a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
  - b. Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan;
  - c. Penguatan pelaksanaan perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan;
  - d. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsive gender;
  - e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilih.
  
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui :
  - a. Peningkatan kapasitas perempuan untuk mengurangi kesenjangan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, serta menerima manfaat pembangunan;
  - b. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendorong peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Review terhadap Awal RKPD tahun 2022

| No       | Awal RKPD                                                    |                                                                  |                                                               |                        |                                | Analisis Kebutuhan                                           |                                                                 |                                                                  |                                                               |                                | Catatan Penting |               |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|--|
|          | Program/Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                              | Lokasi                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Program/Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program /Kegiatan                             | Lokasi                                                           | Target Capaian Kinerja                                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                 |               |  |
| 1        | 2                                                            | 3                                                                | 4                                                             | 5                      | 6                              | 7                                                            | 8                                                               | 9                                                                | 10                                                            | 11                             | 12              |               |  |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b>  | <b>Medan</b>                                                  | <b>100%</b>            | <b>11.249.301.406</b>          | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b> | <b>Medan</b>                                                     | <b>100%</b>                                                   | <b>12.374.231.547</b>          |                 |               |  |
|          | <b>1</b>                                                     | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |                                                               |                        |                                | <b>1</b>                                                     | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                |                                                                  |                                                               |                                |                 |               |  |
|          | 1                                                            | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan            | Medan                  | 3 orang                        | 17.000.000                                                   | 1                                                               | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan            | Medan                          | 3 orang         | 18.700.000    |  |
|          | <b>2</b>                                                     | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |                                                               |                        |                                | <b>2</b>                                                     | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                   |                                                                  |                                                               |                                |                 |               |  |
|          | 2                                                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah gaji dan tunjangan yang disediakan                     | Medan                  | 12 bulan                       | 8.062.567.994                                                | 2                                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah gaji dan tunjangan yang disediakan                     | Medan                          | 12 bulan        | 8.868.824.793 |  |
|          | 3                                                            | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah penatausahaan dan pengujian keuangan yang dilaksanakan | Medan                  | 12 bulan                       | 231.600.000                                                  | 3                                                               | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah penatausahaan dan pengujian keuangan yang dilaksanakan | Medan                          | 12 bulan        | 254.760.000   |  |
|          |                                                              |                                                                  |                                                               |                        |                                |                                                              |                                                                 |                                                                  |                                                               |                                |                 |               |  |

|  |          |                                                                                              |                                                           |       |          |             |  |          |                                                                                              |                                                           |       |          |             |  |
|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--|
|  | <b>3</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                    |                                                           |       |          |             |  | <b>3</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                    |                                                           |       |          |             |  |
|  | 4        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | Bahan Logistik Kantor yang disediakan                     | Medan | 1 tahun  | 86.473.520  |  | 4        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | Bahan Logistik Kantor yang disediakan                     | Medan | 1 tahun  | 95.120.872  |  |
|  | 5        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                     | Bahan bacaan yang disediakan                              | Medan | 12 bulan | 6.072.000   |  | 5        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                     | Bahan bacaan yang disediakan                              | Medan | 12 bulan | 6.679.200   |  |
|  | 6        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan | Medan | 1 tahun  | 11.253.600  |  | 6        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan | Medan | 1 tahun  | 12.378.960  |  |
|  | 7        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan         | Medan | 12 bulan | 4.700.000   |  | 7        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan         | Medan | 12 bulan | 5.170.000   |  |
|  | 8        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan      | Sumut | 1 tahun  | 481.494.000 |  | 8        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan      | Sumut | 1 tahun  | 529.643.400 |  |
|  | 9        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                      | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan            | Medan | 1 tahun  | 28.886.150  |  | 9        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                      | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan            | Medan | 1 tahun  | 31.774.765  |  |
|  |          |                                                                                              |                                                           |       |          |             |  |          |                                                                                              |                                                           |       |          |             |  |
|  | <b>4</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 |                                                           |       |          |             |  | <b>4</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 |                                                           |       |          |             |  |
|  | 10       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarpras pendukung yang mendapatkan pemeliharaan           | Medan | 6 bulan  | 15.525.000  |  | 10       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarpras pendukung yang mendapatkan pemeliharaan           | Medan | 6 bulan  | 17.077.500  |  |

|  |  |          |                                                                                                                 |                                                                  |       |          |             |  |          |                                                                                                                 |                                                                  |       |          |             |  |
|--|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--|
|  |  | 11       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan dinas atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan      | Medan | 12 bulan | 632.260.355 |  | 11       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan dinas atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan      | Medan | 12 bulan | 695.486.391 |  |
|  |  | 12       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan | Medan | 3 unit   | 599.981.391 |  | 12       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan | Medan | 3 unit   | 659.979.530 |  |
|  |  |          |                                                                                                                 |                                                                  |       |          |             |  |          |                                                                                                                 |                                                                  |       |          |             |  |
|  |  | <b>5</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                                                                  |       |          |             |  | <b>5</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                                                                  |       |          |             |  |
|  |  | 13       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan     | Medan | 1 tahun  | 580.475.996 |  | 13       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan     | Medan | 1 tahun  | 638.523.596 |  |
|  |  | 14       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                       | Medan | 1 tahun  | 464.090.400 |  | 14       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                       | Medan | 1 tahun  | 510.499.440 |  |
|  |  | <b>6</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                         |                                                                  |       |          |             |  | <b>6</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                         |                                                                  |       |          |             |  |
|  |  | 15       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun                | Medan | 2 bulan  | 26.921.000  |  | 15       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun                | Medan | 2 bulan  | 29.613.100  |  |
|  |  |          |                                                                                                                 |                                                                  |       |          |             |  |          |                                                                                                                 |                                                                  |       |          |             |  |

| II |    | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                       |                                                                                            |       |           | 453.120.800 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |                                                                                                                                        |                                                                 |       | 349.932.880 |             |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
|    | 7  | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>          |                                                                                            |       |           |             | 7                                | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>          |                                                                 |       |             |             |
|    | 16 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan                            | Sumut | 200 orang | 103.240.000 | 16                               | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan | Sumut | 200 orang   | 113.564.000 |
|    |    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan provins                       | Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus | Sumut | 100 orang | 150.000.000 |                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan provins                       | Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan | Sumut | 100 orang   | 16.500.000  |
|    | 8  | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>             |                                                                                            |       |           |             | 8                                | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>             |                                                                 |       |             |             |

|            |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                             |       |           |                      |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                             |       |           |                      |  |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|--|
|            |                                       | 17                                                                                                    | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan       | Sumut | 100 orang | 119.000.800          |                                       | 17                                                                                                    | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan       | Sumut | 100 orang | 130.900.880          |  |
|            |                                       | 18                                                                                                    | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                            | Jumlah SDM yang memperoleh pengembangan KIE | Sumut | 50 orang  | 80.880.000           |                                       | 18                                                                                                    | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                            | Jumlah SDM yang memperoleh pengembangan KIE | Sumut | 50 orang  | 88.968.000           |  |
|            |                                       |                                                                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan       | Sumut | 100 orang | 175.000.000          |                                       |                                                                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan       | Sumut | 100 orang | 192.500.000          |  |
|            |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                             |       |           |                      |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                             |       |           |                      |  |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b> |                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                             |       |           | <b>1.112.324.394</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b> |                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                             |       |           | <b>1.223.556.833</b> |  |
|            | <b>9</b>                              | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b> |                                                                                                                                                     |                                             |       |           |                      | <b>9</b>                              | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b> |                                                                                                                                                     |                                             |       |           |                      |  |
|            |                                       | 19                                                                                                    | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan       | Sumut | 420 orang | 190.329.365          |                                       | 19                                                                                                    | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan       | Sumut | 420 orang | 209.362.302          |  |

|  |  |    |                                                                                                                                                                |                                                  |       |           |             |  |    |                                                                                                                                                                |                                                  |       |           |             |  |
|--|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--|
|  |  | 20 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                                                      | Jumlah kebutuhan spesifik yang disediakan        | Sumut | 500 orang | 270.498.500 |  | 20 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                                                      | Jumlah kebutuhan spesifik yang disediakan        | Sumut | 500 orang | 297.548.350 |  |
|  |  |    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                            | Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan            | Sumut | 100 orang | 200.000.000 |  |    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                            | Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan            | Sumut | 100 orang | 220.000.000 |  |
|  |  | 10 | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                  |       |           |             |  | 10 | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                  |       |           |             |  |
|  |  | 21 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan | Sumut | 350 orang | 451.496.529 |  | 21 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan | Sumut | 350 orang | 496.646.182 |  |
|  |  |    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                |                                                  |       |           |             |  |    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                |                                                  |       |           | -           |  |
|  |  |    |                                                                                                                                                                |                                                  |       |           |             |  |    |                                                                                                                                                                |                                                  |       |           |             |  |

| IV | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                                                                    |                                                                                   |       |         |            | 252.672.000 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                                                                    |                                                                                   |       |         |             | 277.939.200 |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|
|    | 11                                                        | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>                                         |                                                                                   |       |         |            |             | 11                                                        | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>                                         |                                                                                   |       |         |             |             |
|    | 22                                                        | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi                                              | jumlah peserta yang mendapatkan advokasi                                          | Sumut | 70 org  | 62.056.000 |             | 22                                                        | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi                                              | jumlah peserta yang mendapatkan advokasi                                          | Sumut | 70 org  | 68.261.600  |             |
|    | 23                                                        | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi                                                | Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peran perempuan dalam politik | Sumut | 1 dok   | 31.985.000 |             | 23                                                        | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi                                                | Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peran perempuan dalam politik | Sumut | 1 dok   | 35.183.500  |             |
|    | 12                                                        | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>        |                                                                                   |       |         |            |             | 12                                                        | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>        |                                                                                   |       |         |             |             |
|    | 24                                                        | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan                                         | Sumut | 240 org | 99.075.000 |             | 24                                                        | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan                                         | Sumut | 240 org | 108.982.500 |             |

|           |    |                                                                                                         |  |                                                                                              |       |         |                    |                                              |                                                                                                         |  |                                                                                              |       |         |                    |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|
|           | 13 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi          |  |                                                                                              |       |         |                    | 13                                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi          |  |                                                                                              |       |         |                    |
|           | 25 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi    |  | Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                            | Sumut | 50 org  | 59.556.000         | 25                                           | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi    |  | Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                            | Sumut | 50 org  | 65.511.600         |
| <b>V</b>  |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                            |  |                                                                                              |       |         | <b>34.889.500</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b> |                                                                                                         |  |                                                                                              |       |         | <b>38.378.450</b>  |
|           | 14 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi  |  |                                                                                              |       |         |                    | 14                                           | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi  |  |                                                                                              |       |         |                    |
|           | 26 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                |  | Jumlah peserta advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | Sumut | 350 org | 34.889.500         | 26                                           | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                |  | Jumlah peserta advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | Sumut | 350 org | 38.378.450         |
| <b>VI</b> |    | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                 |  |                                                                                              |       |         | <b>491.617.400</b> | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>      |                                                                                                         |  |                                                                                              |       |         | <b>540.779.140</b> |
|           | 15 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi |  |                                                                                              |       |         |                    | 15                                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi |  |                                                                                              |       |         |                    |

|            |  |           |                                                                                                                                           |                                              |          |    |                   |  |           |                                                                                                                                           |                                              |          |    |                    |  |
|------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----|-------------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----|--------------------|--|
|            |  | 27        | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                    | Layanan Kesehatan Ramah Anak                 | Sumut    | 20 | 446.208.400       |  | 27        | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                    | Layanan Kesehatan Ramah Anak                 | Sumut    | 20 | 490.829.240        |  |
|            |  |           |                                                                                                                                           | Layanan Pendidikan Ramah Anak                | Sumut    | 30 |                   |  |           |                                                                                                                                           | Layanan Pendidikan Ramah Anak                | Sumut    | 30 |                    |  |
|            |  |           |                                                                                                                                           | Ruang Bermain Ramah Anak                     | Sumut    | 4  |                   |  |           |                                                                                                                                           | Ruang Bermain Ramah Anak                     | Sumut    | 4  |                    |  |
|            |  | 28        | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | FAD yang mendapatkan penguatan               | Kab/Kota | 33 | 29.004.000        |  | 28        | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | FAD yang mendapatkan penguatan               | Kab/Kota | 33 | 31.904.400         |  |
|            |  |           |                                                                                                                                           |                                              |          |    |                   |  |           |                                                                                                                                           |                                              |          |    |                    |  |
|            |  | <b>16</b> | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>                                         |                                              |          |    |                   |  | <b>16</b> | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>                                         |                                              |          |    |                    |  |
|            |  | 29        | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (menuju) | kab/kota | 19 | 16.405.000        |  | 29        | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (menuju) | kab/kota | 19 | 18.045.500         |  |
|            |  |           |                                                                                                                                           |                                              |          |    |                   |  |           |                                                                                                                                           |                                              |          |    |                    |  |
| <b>VII</b> |  |           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                    |                                              |          |    | <b>92.473.500</b> |  |           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                    |                                              |          |    | <b>101.720.850</b> |  |

| 17 |    | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi |                                               |       |              |            | 17 |    | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi |                                               |       |              |            |  |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|------------|--|
|    | 30 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                        | Aplikasi penyediaan data gender dan anak      | Sumut | 2 aplk       | 17.640.000 |    | 30 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                        | Aplikasi penyediaan data gender dan anak      | Sumut | 2 aplk       | 19.404.000 |  |
|    | 31 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                              | Variabel data gender dan anak yang disediakan | Sumut | 110 variabel | 74.833.500 |    | 31 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                              | Variabel data gender dan anak yang disediakan | Sumut | 110 variabel | 82.316.850 |  |

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

rencana kerja Dinas PPPA Sumatera Utara didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah yang mana pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Usulan Masyarakat Tahun 2022

| No                                                 | Program/Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                               | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) |                        |                               | Catatan Penting | Rencana Tahun 2022     |                               |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                                    |                                                       |                                                                  | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| -1                                                 | -2                                                    | -3                                                               | -4                                 | -6                     | -7                            | -8              | -9                     | -10                           | -11         |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |                                                       |                                                                  |                                    |                        | 17.014.598.000                |                 |                        | 18.704.057.800                |             |
| I                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran         | Dinas PP dan PA                    | 80                     | 7.250.000.000                 |                 |                        | 7.975.000.000                 |             |
|                                                    | 1                                                     | Administrasi Umum                                                |                                    |                        |                               |                 |                        |                               |             |
|                                                    | 1                                                     | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Dinas PP dan PA                    | 36 orang               | 600.000.000                   |                 | 36 orang               | 660.000.000                   |             |
|                                                    | 2                                                     | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Dinas PP dan PA                    | 1 paket                | 300.000.000                   |                 | 1 paket                | 330.000.000                   |             |
|                                                    | 3                                                     | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                  | Dinas PP dan PA                    | 2 orang                | 200.000.000                   |                 | 2 orang                | 220.000.000                   |             |
|                                                    | 4                                                     | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Dinas PP dan PA                    | 400 paket              | 100.000.000                   |                 | 400 paket              | 110.000.000                   |             |
|                                                    | 5                                                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas PP dan PA                    | 2 unit                 | 90.000.000                    |                 | 2 unit                 | 99.000.000                    |             |

|  |    |                                                                        |                                                                |                 |            |             |  |            |             |  |
|--|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--|------------|-------------|--|
|  | 6  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan   | Dinas PP dan PA | 12 bulan   | 500.000.000 |  | 12 bulan   | 550.000.000 |  |
|  | 7  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | Dinas PP dan PA | 12 bulan   | 250.000.000 |  | 12 bulan   | 275.000.000 |  |
|  | 8  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | Alat tulis kantor yang disediakan                              | Dinas PP dan PA | 4 triwulan | 200.000.000 |  | 4 triwulan | 220.000.000 |  |
|  | 9  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                     | Peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapatkan pemeliharaan | Dinas PP dan PA | 30 unit    | 550.000.000 |  | 30 unit    | 605.000.000 |  |
|  | 10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa supir yang disediakan                                     | Dinas PP dan PA | 12 bulan   | 780.000.000 |  | 12 bulan   | 858.000.000 |  |
|  | 11 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                   | Perlengkapan gedung/kantor yang disediakan                     | Dinas PP dan PA | 13 unit    | 500.000.000 |  | 13 unit    | 550.000.000 |  |
|  | 12 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan             | Dinas PP dan PA | 3 unit     | 600.000.000 |  | 3 unit     | 660.000.000 |  |
|  | 13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan                  | Dinas PP dan PA | 10 unit    | 800.000.000 |  | 10 unit    | 880.000.000 |  |
|  | 14 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Peralatan dan perlengkapan yang diadakan                       | Dinas PP dan PA | 12 unit    | 200.000.000 |  | 12 unit    | 220.000.000 |  |
|  | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah bahan bacaan yang disediakan                            | Dinas PP dan PA | 5 eks      | 60.000.000  |  | 5 eks      | 66.000.000  |  |

|  |   |    |                                                                            |                                                                  |                 |         |             |  |         |             |  |
|--|---|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|--|---------|-------------|--|
|  |   | 16 | Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah                                | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                              | Dinas PP dan PA | 80 kali | 500.000.000 |  | 80 kali | 550.000.000 |  |
|  |   | 17 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                        | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                              | Dinas PP dan PA | 40 kali | 600.000.000 |  | 40 kali | 660.000.000 |  |
|  |   |    |                                                                            |                                                                  |                 |         |             |  |         |             |  |
|  | 2 |    | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                  |                 |         |             |  |         |             |  |
|  |   | 18 | Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Pelaksanaan Outbound                  | Jumlah kegiatan pendukung peningkatan mental dan spiritual sdm   | Dinas PP dan PA | 2 keg   | 70.000.000  |  | 2 keg   | 77.000.000  |  |
|  |   |    |                                                                            |                                                                  |                 |         |             |  |         |             |  |
|  | 3 |    | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |                                                                  |                 |         |             |  |         |             |  |
|  |   | 19 | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                            | Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal | Dinas PP dan PA | 3 orang | 40.000.000  |  | 3 orang | 44.000.000  |  |
|  |   |    |                                                                            |                                                                  |                 |         |             |  |         |             |  |
|  | 4 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           |                                                                  |                 |         |             |  |         |             |  |
|  |   | 20 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah lembaga sinergi PPPA                                      | Dinas PP dan PA | 3 orang | 110.000.000 |  | 3 orang | 121.000.000 |  |

|           |                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                             |                 |           |                      |  |           |                      |  |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------------|--|-----------|----------------------|--|
|           |                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | Jumlah dokumen tersusun     | Dinas PP dan PA | 6 dok     | 200.000.000          |  | 6 dok     | 220.000.000          |  |
|           |                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                             |                 |           |                      |  |           |                      |  |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                             |                 |           | <b>3.581.000.000</b> |  |           | <b>3.927.100.000</b> |  |
|           | 5                                     | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                  |                             |                 |           |                      |  |           |                      |  |
|           |                                       | 21                                                                                                                                                      | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah korban yang dilayani | Sumut           | 250 orang | 1.500.000.000        |  | 250 orang | 1.650.000.000        |  |
|           |                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                             |                 |           |                      |  |           |                      |  |
|           | 6                                     | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                          |                                                                                                                                  |                             |                 |           |                      |  |           |                      |  |

|  |  |    |                                                                                                                               |                                                                                                                             |       |            |             |  |            |             |  |
|--|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|--|------------|-------------|--|
|  |  | 22 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi   | Terlaksananya penyusunan kebijakan terkait perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak                          | Sumut | 1 dok      | 250.000.000 |  | 1 dok      | 275.000.000 |  |
|  |  | 23 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang                               | Sumut | 4 keg      | 320.000.000 |  | 4 keg      | 352.000.000 |  |
|  |  | 24 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi   | Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina TKI)                                             | Sumut | 5 kab/kota | 211.000.000 |  | 5 kab/kota | 232.100.000 |  |
|  |  | 25 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                     | Terselenggaranya kegiatan penguatan dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat dan kondisi khusus | Sumut | 4 kegiatan | 850.000.000 |  | 4 kegiatan | 935.000.000 |  |

|            |  |    |                                                                                                                             |                                                         |       |            |                      |  |            |                      |  |
|------------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------|--|------------|----------------------|--|
|            |  | 26 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi   | Adanya pelatihan SDM lembaga layanan Perlindungan Anak  | Sumut |            | 330.000.000          |  |            | 363.000.000          |  |
|            |  |    |                                                                                                                             |                                                         |       |            |                      |  |            |                      |  |
|            |  |    | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                         |       |            |                      |  |            |                      |  |
|            |  | 27 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                      | Terintegrasinya Materi Materi KDRT Pada Calon Pengantin | Sumut | 4 kegiatan | 120.000.000          |  | 4 kegiatan | 120.000.000          |  |
|            |  |    |                                                                                                                             |                                                         |       |            |                      |  |            |                      |  |
| <b>III</b> |  |    | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                     |                                                         |       |            | <b>1.110.000.000</b> |  |            | <b>1.221.000.000</b> |  |
|            |  | 7  | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota      |                                                         |       |            |                      |  |            |                      |  |

|           |                                                                  |    |                                                                                                                                        |                                                                                                    |       |         |                      |  |         |                      |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--|---------|----------------------|--|
|           |                                                                  | 28 | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                               | Adanya pelatihan Pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak | Sumut | 3 kali  | 220.000.000          |  | 3 kali  | 242.000.000          |  |
|           |                                                                  | 29 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                         | Terlaksananya Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)                      | Sumut | 800 org | 320.000.000          |  | 800 org | 352.000.000          |  |
|           |                                                                  | 30 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Terselenggarana Kegiatan Advokasi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan                       | Sumut | 5 keg   | 350.000.000          |  | 5 keg   | 385.000.000          |  |
|           |                                                                  |    |                                                                                                                                        | Jumlah peserta yang mendapatkan advokasi Perlindungan Khusus Anak                                  | Sumut | 180 org | 220.000.000          |  | 180 org | 242.000.000          |  |
|           |                                                                  |    |                                                                                                                                        |                                                                                                    |       |         |                      |  |         |                      |  |
| <b>IV</b> | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b> |    |                                                                                                                                        |                                                                                                    |       |         | <b>1.140.000.000</b> |  |         | <b>1.254.000.000</b> |  |

|  |   |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                   |       |         |             |  |         |             |
|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|--|---------|-------------|
|  | 8 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                                  |                                                                                       |                                                                                   |       |         |             |  |         |             |
|  |   | 31                                                                                                                   | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | jumlah peserta yang ikut penguatan                                                | Sumut | 50 org  | 150.000.000 |  | 50 org  | 165.000.000 |
|  |   |                                                                                                                      |                                                                                       | Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan                                           | Sumut | 100 org | 100.000.000 |  | 100 org | 110.000.000 |
|  |   |                                                                                                                      |                                                                                       | Jumlah rekomendasi yang disusun                                                   | Sumut | 12 dok  | 120.000.000 |  | 12 dok  | 132.000.000 |
|  |   | 32                                                                                                                   | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi               | Jumlah peserta Fasilitas pelaksanaan PUG bidang pembangunan keluarga              | Sumut | 100 org | 250.000.000 |  | 100 org | 275.000.000 |
|  |   | 33                                                                                                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi   | Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peran perempuan dalam politik | Sumut | 1 dok   | 230.000.000 |  | 1 dok   | 253.000.000 |
|  |   |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                   |       |         |             |  |         |             |
|  | 9 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi |                                                                                       |                                                                                   |       |         |             |  |         |             |

|  |          |                                              |                                                                                                                                        |                                                           |       |         |                    |  |         |                    |  |
|--|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--|---------|--------------------|--|
|  |          | 34                                           | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                         | Jumlah peserta sosialisasi                                | Sumut | 200 org | 150.000.000        |  | 200 org | 165.000.000        |  |
|  |          | 35                                           | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi     | Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan                 | Sumut | 10 unit | 140.000.000        |  | 10 unit | 154.000.000        |  |
|  |          |                                              |                                                                                                                                        |                                                           |       |         |                    |  |         |                    |  |
|  | <b>V</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b> |                                                                                                                                        |                                                           |       |         | <b>500.000.000</b> |  |         | <b>550.000.000</b> |  |
|  |          | 10                                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi |                                                           |       |         |                    |  |         |                    |  |
|  |          | 36                                           | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                           | Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan | Sumut | 100 org | 150.000.000        |  | 100 org | 165.000.000        |  |
|  |          |                                              |                                                                                                                                        |                                                           |       |         |                    |  |         |                    |  |

|           |    |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                              |       |         |                      |  |         |                      |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--|---------|----------------------|
|           | 11 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi  |                                                                                                       |                                                                                              |       |         |                      |  |         |                      |
|           |    | 37                                                                                                      | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan                                                      | Sumut | 100 org | 130.000.000          |  | 100 org | 143.000.000          |
|           |    | 38                                                                                                      | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi              | Jumlah peserta advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | Sumut | 350 org | 220.000.000          |  | 350 org | 242.000.000          |
|           |    |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                              |       |         |                      |  |         |                      |
| <b>VI</b> |    | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                 |                                                                                                       |                                                                                              |       |         | <b>1.958.998.000</b> |  |         | <b>2.154.897.800</b> |
|           | 12 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi |                                                                                                       |                                                                                              |       |         |                      |  |         |                      |
|           |    | 39                                                                                                      | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                | Jumlah FAD                                                                                   | Sumut | 33 FAD  | 520.000.000          |  | 33 FAD  | 572.000.000          |

|  |  |    |                                                                                                                                                     |                                           |       |            |             |  |            |             |  |
|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------|-------------|--|------------|-------------|--|
|  |  |    |                                                                                                                                                     | Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak          | Sumut | 5 kab/kota | 160.000.000 |  | 5 kab/kota | 176.000.000 |  |
|  |  |    |                                                                                                                                                     | SDM menguasai PRA                         | Sumut | 100 org    | 75.000.000  |  | 100 org    | 82.500.000  |  |
|  |  |    |                                                                                                                                                     | Jumlah SRA di Kab/Kota                    | Sumut | 6 kab/kota | 120.000.000 |  | 6 kab/kota | 132.000.000 |  |
|  |  |    |                                                                                                                                                     |                                           |       |            |             |  |            |             |  |
|  |  | 40 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota              |                                           |       |            |             |  |            |             |  |
|  |  |    |                                                                                                                                                     |                                           |       |            |             |  |            |             |  |
|  |  | 41 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | jumlah peserta yang mendapatkan Penguatan | Sumut | 150 org    | 110.000.000 |  | 150 org    | 121.000.000 |  |

|  |  |    |                                                                                                                                                     |                                                                     |       |            |             |  |            |             |  |
|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|--|------------|-------------|--|
|  |  | 42 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | jumlah anak mendapatkan hak atas pendidikan, kreatifitas dan budaya | Sumut | 1500 org   | 351.498.000 |  | 1500 org   | 386.647.800 |  |
|  |  | 43 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                              | jumlah puspa yang dibentuk dan jumlah yang mendapatkan layanan      | Sumut | 10 lembaga | 220.000.000 |  | 10 lembaga | 242.000.000 |  |
|  |  |    |                                                                                                                                                     |                                                                     |       |            |             |  |            |             |  |
|  |  | 13 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                          |                                                                     |       |            |             |  |            |             |  |
|  |  | 44 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi           | Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak                                 | Sumut | 6 dok      | 127.500.000 |  | 6 dok      | 140.250.000 |  |
|  |  |    |                                                                                                                                                     | Jumlah APSAI di Provinsi Sumatera Utara                             | Sumut | 1 dok      | 275.000.000 |  | 1 dok      | 302.500.000 |  |
|  |  |    |                                                                                                                                                     |                                                                     |       |            |             |  |            |             |  |

| VII | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK |                                                                                                                       |                                                                                           |       |            | 1.474.600.000 |  |            | 1.622.060.000 |  |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|--|------------|---------------|--|
|     | 14                                              | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                           |       |            |               |  |            |               |  |
|     |                                                 | 45 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                     | Data Gender dan Anak yang ditampilkan di SIGA Meningkat dari Tahun sebelumnya             | Sumut | 80 org     | 150.500.000   |  | 80 org     | 165.550.000   |  |
|     |                                                 |                                                                                                                       | tersedianya 1 aplikasi/modul program                                                      | Sumut | 1 modul    | 317.500.000   |  | 1 modul    | 349.250.000   |  |
|     |                                                 |                                                                                                                       | Jumlah dokumen profil yang dihasilkan                                                     | Sumut | 3 dok      | 147.200.000   |  | 3 dok      | 161.920.000   |  |
|     |                                                 |                                                                                                                       | Terlaksananya kegiatan KIE baik melalui media cetak, elektronik, online maupun luar ruang | Sumut | 3 keg      | 316.500.000   |  | 3 keg      | 348.150.000   |  |
|     |                                                 |                                                                                                                       | Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan                                                    | Sumut | 400 org    | 137.600.000   |  | 400 org    | 151.360.000   |  |
|     |                                                 | 46 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                           | Data Gender dan Anak yang ditampilkan di SIGA Meningkat dari Tahun sebelumnya             | Sumut | 66 org     | 215.800.000   |  | 66 org     | 237.380.000   |  |
|     |                                                 |                                                                                                                       | Jumlah Kab/Kota yang Mendapat Penguatan                                                   | Sumut | 5 kab/kota | 189.500.000   |  | 5 kab/kota | 208.450.000   |  |

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah**

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga

- bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.
3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 untuk pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sesuai dengan RPJMD Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 yang mempunyai visi **“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”**. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara telah terintegrasi ke dalam prioritas pembangunan Sumatera Utara pada Misi ke -1 yaitu **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan** dengan prioritas pembangunan pada Peningkatan Pelayanan Sektor Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga, meliputi :

- a. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan
- b. Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak
- c. Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- d. Penurunan Pekerja Anak

e. Pencegahan Perkawinan Anak.

**3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Secara Umum Tujuan Rencana Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak

Adapun sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
2. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
3. Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
4. Meningkatnya kualitas hidup anak;

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas PPPA Sumatera Utara Tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang. Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka telah disusun program dan kegiatan DPPPA Sumatera Utara untuk Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 7  
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

| NO       | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR                                                               | RENCANA TAHUN 2022                                |                       | CATATAN PENTING | RENCANA TAHUN 2023 |                       | SUMBER DANA    |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------|
|          |                                                                  |                                                                         | TARGET                                            | PAGU INDIKATIF        |                 | TARGET             | PAGU INDIKATIF        |                |
|          | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVSU</b> |                                                                         |                                                   | <b>18.078.778.431</b> |                 |                    | <b>19.886.656.274</b> |                |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     |                                                                         |                                                   | <b>13.442.146.481</b> |                 |                    | <b>14.786.361.129</b> |                |
|          | <b>1</b>                                                         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                   | <b>299.922.000</b>    |                 |                    | <b>329.914.200</b>    |                |
|          |                                                                  | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Dokumen perencanaan yang disusun                  | 10 dok                | 299.922.000     |                    | 10 dok                | 329.914.200    |
|          | <b>2</b>                                                         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                   | <b>10.215.570.000</b> |                 |                    | <b>11.237.127.000</b> |                |
|          |                                                                  | 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Gaji dan Tunjangan yang disediakan                | 14 kali               | 9.967.050.000   |                    | 14 kali               | 10.963.755.000 |
|          |                                                                  | 3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan | 12 bulan              | 248.520.000     |                    | 12 bulan              | 273.372.000    |
|          | <b>3</b>                                                         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                                                   | <b>90.490.000</b>     |                 |                    | <b>99.539.000</b>     |                |
|          |                                                                  | 4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan          | 3 orang               | 90.490.000      |                    | 3 orang               | 99.539.000     |

|  |          |                                                                              |                                                                          |          |                      |  |          |                      |  |
|--|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--|----------|----------------------|--|
|  | <b>4</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |                                                                          |          | <b>1.247.546.485</b> |  |          | <b>1.372.301.134</b> |  |
|  | 5        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor             | Komponen Instalasi Listri dan Penerangan Bangunan kantor yang disediakan | 12 bulan | 22.589.200           |  | 12 bulan | 24.848.120           |  |
|  | 6        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                        | 15 unit  | 164.214.450          |  | 15 unit  | 180.635.895          |  |
|  | 7        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Bahan logistik kantor yang disediakan                                    | 12 bulan | 148.114.835          |  | 12 bulan | 162.926.319          |  |
|  | 8        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                           | 12 bulan | 106.160.000          |  | 12 bulan | 116.776.000          |  |
|  | 9        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Bahan bacaan dan peraturan yang disediakan                               | 12 bulan | 6.900.000            |  | 12 bulan | 7.590.000            |  |
|  | 10       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan                | 12 bulan | 799.568.000          |  | 12 bulan | 879.524.800          |  |
|  |          |                                                                              |                                                                          |          |                      |  |          |                      |  |
|  | <b>5</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                          |          | <b>1.091.975.996</b> |  |          | <b>1.201.173.596</b> |  |
|  | 11       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan             | 12 bulan | 573.275.996          |  | 12 bulan | 630.603.596          |  |
|  | 12       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan                               | 13 kali  | 518.700.000          |  | 13 kali  | 570.570.000          |  |
|  |          |                                                                              |                                                                          |          |                      |  |          |                      |  |
|  | <b>6</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                          |          | <b>496.642.000</b>   |  |          | <b>546.306.200</b>   |  |
|  | 13       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak                      | Kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan                | 10 unit  | 248.742.000          |  | 10 unit  | 273.616.200          |  |

|           |                                                                  |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |           |                    |  |           |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|-----------|--------------------|
|           |                                                                  |                                                                                            | dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      |                                                                                  |           |                    |  |           |                    |
|           |                                                                  | 14                                                                                         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Gedung kantor dan bangunan lain yang mendapatkan pemeliharaan                    | 2 unit    | 189.975.000        |  | 2 unit    | 208.972.500        |
|           |                                                                  | 15                                                                                         | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lain yang mendapatkan pemeliharaan | 10 unit   | 57.925.000         |  | 10 unit   | 63.717.500         |
|           |                                                                  |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |           |                    |  |           |                    |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b> |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |           | <b>763.640.000</b> |  |           | <b>840.004.000</b> |
|           | <b>7</b>                                                         | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b> |                                                                                              |                                                                                  |           | <b>292.064.000</b> |  |           | <b>321.270.400</b> |
|           |                                                                  | 16                                                                                         | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi          | Jumlah perda yang disusun                                                        | 1 dok     | 113.500.000        |  | 1 dok     | 124.850.000        |
|           |                                                                  | 17                                                                                         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi        | Persentase anggaran responsif gender dari total belanja operasi                  | 25 persen | 178.564.000        |  | 25 persen | 196.420.400        |
|           |                                                                  |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |           |                    |  |           |                    |
|           | <b>8</b>                                                         | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi</b>   |                                                                                              |                                                                                  |           | <b>282.192.000</b> |  |           | <b>310.411.200</b> |

|            |                                       |                                                                                                                                                                |                                                                         |           |                      |  |           |                      |  |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|-----------|----------------------|--|
|            |                                       | <b>Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>                                                                                                                      |                                                                         |           |                      |  |           |                      |  |
|            | 18                                    | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                            | Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan yang dibentuk (sekolah perempuan) | 5 lembaga | 282.192.000          |  | 5 lembaga | 310.411.200          |  |
|            |                                       |                                                                                                                                                                | Jumlah pasar online yang dibentuk                                       | 100 unit  |                      |  | 100 unit  |                      |  |
|            | <b>9</b>                              | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                                                          |                                                                         |           | <b>189.384.000</b>   |  |           | <b>208.322.400</b>   |  |
|            | 19                                    | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                           | Jumlah IR yang mendapatkan KUR                                          | 100 unit  | 189.384.000          |  | 100 unit  |                      |  |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b> |                                                                                                                                                                |                                                                         |           | <b>1.519.871.600</b> |  |           | <b>1.671.858.760</b> |  |
|            | <b>10</b>                             | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                         |           | <b>1.054.542.800</b> |  |           | <b>1.159.997.080</b> |  |

|  |  |           |                                                                                                                                  |                                                                                    |              |                    |  |              |                    |  |
|--|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--|--------------|--------------------|--|
|  |  | 20        | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | Jumlah layanan pengaduan yang diberikan                                            | 1200 layanan | 1.054.542.800      |  | 1200 layanan | 1.159.997.080      |  |
|  |  |           |                                                                                                                                  |                                                                                    |              |                    |  |              |                    |  |
|  |  | <b>11</b> | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                            |                                                                                    |              | <b>465.328.800</b> |  |              | <b>511.861.680</b> |  |
|  |  | 21        | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                        | Jumlah Perempuan yang mendapat penguatan dan fasilitasi perlindungan hak perempuan | 300 Paket    | 283.180.000        |  | 300 Paket    | 311.498.000        |  |
|  |  |           |                                                                                                                                  | Pemenuhan kebutuhan spesifik dalam kondisi darurat dan kondisi khusus              | 100 Persen   |                    |  | 100 Persen   |                    |  |
|  |  | 22        | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota    | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan  | 20 lembaga   | 182.148.800        |  | 20 lembaga   | 200.363.680        |  |
|  |  |           |                                                                                                                                  | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan yang memahami konsep perlindungan perempuan    | 400 orang    |                    |  | 400 orang    |                    |  |
|  |  |           |                                                                                                                                  |                                                                                    |              |                    |  |              |                    |  |

|           |                                                        |                                                                                                                              |                                                     |            |                      |  |            |                      |  |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|--|------------|----------------------|--|
| <b>IV</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>           |                                                                                                                              |                                                     |            | <b>349.951.500</b>   |  |            | <b>384.946.650</b>   |  |
|           | <b>12</b>                                              | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>                |                                                     |            | <b>349.951.500</b>   |  |            | <b>384.946.650</b>   |  |
|           |                                                        | 23 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                  | jumlah layanan keluarga yang dibentuk               | 20 layanan | 349.951.500          |  | 20 layanan | 384.946.650          |  |
| <b>V</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b> |                                                                                                                              |                                                     |            | <b>584.286.450</b>   |  |            | <b>642.715.095</b>   |  |
|           | <b>13</b>                                              | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b> |                                                     |            | <b>584.286.450</b>   |  |            | <b>642.715.095</b>   |  |
|           |                                                        | 24 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                  | Jumlah variabel data yang dituangkan kedalam sistem | 6 variabel | 241.891.450          |  | 6 variabel | 266.080.595          |  |
|           |                                                        | 25 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                            | Jumlah variabel data per urusan yang dimanfaatkan   | 6 variabel | 342.395.000          |  | 6 variabel | 376.634.500          |  |
| <b>VI</b> | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                |                                                                                                                              |                                                     |            | <b>1.086.339.150</b> |  |            | <b>1.194.973.065</b> |  |
|           | <b>14</b>                                              | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan</b>                                                          |                                                     |            | <b>149.902.500</b>   |  |            | <b>164.892.750</b>   |  |

|  |           |                                                                                                                                           |                                                                       |            |                    |  |            |                      |  |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--|------------|----------------------|--|
|  |           | <b>Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>                                                                                                    |                                                                       |            |                    |  |            |                      |  |
|  | 26        | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah Faskes dengan layanan ramah anak yang disediakan               | 10 unit    | 149.902.500        |  | 10 unit    | 164.892.750          |  |
|  |           |                                                                                                                                           | Jumlah lembaga non pemerintah yang berkontribusi dalam perwujudan KLA | 20 lembaga |                    |  | 20 lembaga |                      |  |
|  |           |                                                                                                                                           | Jumlah lembaga pemerintah yang mengalokasikan anggaran mendukung KLA  | 15 lembaga |                    |  | 15 lembaga |                      |  |
|  |           |                                                                                                                                           |                                                                       |            |                    |  |            |                      |  |
|  | <b>15</b> | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>                            |                                                                       |            | <b>936.436.650</b> |  |            | <b>1.030.080.315</b> |  |
|  | 27        | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                    | Jumlah Fasum dengan layanan ramah anak                                | 5 unit     | 586.458.650        |  | 5 unit     | 645.104.515          |  |
|  |           |                                                                                                                                           | Jumlah Lembaga Pendidikan dengan layanan ramah anak yang disediakan   | 10 unit    |                    |  | 10 unit    |                      |  |

|            |                                         |                                                                                                                                        |                                                                                         |            |                    |  |            |                    |  |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--|------------|--------------------|--|
|            | 28                                      | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | Jumlah lembaga mitra FAD yang mengkampanyekan Hak Anak                                  | 20 lembaga | 349.978.000        |  | 20 lembaga | 384.975.800        |  |
|            |                                         |                                                                                                                                        | jumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah penyedia layanan yangmendapatkan penguatan | 33 lembaga |                    |  | 33 lembaga |                    |  |
| <b>VII</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b> |                                                                                                                                        |                                                                                         |            | <b>332.543.250</b> |  |            | <b>365.797.575</b> |  |
|            | <b>16</b>                               | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota</b>          |                                                                                         |            | <b>106.344.000</b> |  |            | <b>116.978.400</b> |  |
|            | 29                                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta yang mendapat advokasi anak dari tindakan kekerasan                      | 300 Orang  | 106.344.000        |  | 300 Orang  | 116.978.400        |  |
|            |                                         |                                                                                                                                        | Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat advokasi              | 60 Persen  |                    |  | 60 Persen  |                    |  |
|            | <b>17</b>                               | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan</b>                                                |                                                                                         |            | <b>226.199.250</b> |  |            | <b>248.819.175</b> |  |

|  |    | Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                       |                                                                                        |           |             |  |           |             |  |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--|-----------|-------------|--|
|  | 30 | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta yang mendapat pengembangan KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus | 250 Orang | 226.199.250 |  | 250 Orang | 248.819.175 |  |
|  |    |                                                                                                          | Persentase penyebaran KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus                     | 75 Persen |             |  | 75 Persen |             |  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini mempedomani Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan diharapkan menjadi perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan layanan dan kondisi lain yang tidak dapat diantisipasi seperti bencana.

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen masyarakat, Akademisi, tenaga ahli, Lembaga Masyarakat yang fokus dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara serta seluruh pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan dalam penentuan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas. Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara secara intensif.

Medan, Juli 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

dto

Hj. NURLELA, SH,M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19621023 198602 2 001